

Analysis Of Regional Government Expenditure And Performance Findings Based On Audit Findings And The Value For Money Concept In West Sumatra Province TA 2017-2021

Analisis Temuan Audit Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Di Provinsi Sumatera Barat TA 2017-2021

Widia Fitri

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas

widiafitry44@gmail.com¹

ABSTRACT

This research aims to analyze related findings that occurred in several districts/cities in West Sumatra Province. The analysis carried out is generally carried out in five parts starting from the analysis of found accounts in four districts/cities, then analyzing the pattern of findings and the tendency of repeated findings for findings that occur more than once in the same account, analyzing audit conditions, analyzing the frequency of findings based on the type of regional government financial reports, and analyzing problems with found accounts in four districts/cities in West Sumatra 2017-2021. The research uses secondary data obtained from the BPK Audit Results Report (LHP) in West Sumatra Province during the period 2017 to 2021. The type of research used is qualitative research with an analysis method using content analysis. By using content analysis, by using coding. Code 1 (one) for information about a finding and 0 (zero) for no finding. The results of the research show that the pattern of findings occurs due to a lack of supervision by each level in each region or a multilevel pattern and non-compliance with laws and regulations carried out by government officials, and not all findings that occur more than once on the same account have an indication of the occurrence repeated findings, however, the results of this research analysis show that several accounts have indications of repeated findings. The results are based on the frequency of findings based on the type of financial report. There are still weaknesses in the internal control system and non-compliance with laws and regulations in districts/cities in West Sumatra which are caused by weak internal control system in each SKPD, non-compliance with statutory regulations, non-optimal role of other parties, incomplete follow-up, and limitations in the quality and quantity of human resources.

Keywords: Audit Findings, Pattern of Findings, Repeated Findings, Internal Control System Findings, Compliance Findings with Legislation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait temuan yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Analisis yang dilakukan secara umum dilakukan atas lima bagian yang dimulai dari analisis akun-akun temuan pada empat kabupaten/kota, kemudian akan dianalisis pola temuan dan kecenderungan temuan berulang atas temuan yang terjadi lebih dari satu kali pada akun yang sama, melakukan analisis kondisi audit, menganalisis frekuensi temuan berdasarkan jenis laporan keuangan pemerintah daerah, dan analisis permasalahan atas akun-akun temuan di empat kabupaten/kota di Sumatera Barat 2017-2021. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2017 sampai 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis menggunakan *content analysis* (analisis isi). Dengan menggunakan *content analysis* pengkodean. Kode 1(satu) untuk keterangan adanya temuan dan 0 (nol) untuk tidak adanya temuan. Hasil penelitian menunjukkan pola temuan terjadi akibat kurangnya pengawasan oleh setiap tingkat di masing-masing daerah atau pola bertingkat dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, dan tidak semua temuan yang terjadi lebih dari satu kali pada akun yang sama memiliki indikasi terjadinya temuan berulang, akan tetapi hasil analisis penelitian ini menunjukkan beberapa akun yang memiliki indikasi temuan berulang, hasil berdasarkan frekuensi temuan berdasarkan jenis laporan keuangan masih ditemukannya kelemahan atas sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada kabupaten/kota di Sumatera Barat yang disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal pada masing-masing SKPD, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peran dari pihak lain yang tidak optimal, tidak tuntasnya tindak lanjut, dan keterbatasan dalam kualitas dan kuantitas SDM.

Kata Kunci: Temuan Audit, Pola Temuan, Temuan Berulang, Temuan Sistem Pengendalian Internal, Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

1. Pendahuluan

Pemerintah Daerah adalah bagian tak terpisahkan dari struktur pemerintahan Indonesia dan harus sejalan dengan pemerintahan nasional. Sebaliknya, pemerintahan negara harus memperhatikan peran penting pemerintah daerah, terutama dalam urusan keuangan dan administrasi wilayah. Untuk menjaga akuntabilitas pemerintah daerah, publikasi berbagai laporan keuangan, termasuk Laporan Keuangan

“Pemerintah Daerah (LKPD), menjadi aspek penting. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 menetapkan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, serta menjamin pengendalian internal yang memadai untuk mencegah kesalahan signifikan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, kualitas informasi dalam laporan keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, harus memenuhi kriteria relevansi, keandalan, kemampuan untuk dibandingkan, dan kemudahan pemahaman”.

Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas publik dari pemerintah, sehingga penting bagi pemerintah untuk bersikap terbuka dalam semua hal terkait dengan tanggung jawab pemerintah, memperkuat Tanggung jawab dan keterusterangan merupakan hal yang mendasar untuk memperbaiki sifat laporan anggaran dan memperkuat kontrol internal dan konsistensi administratif di area publik. Langkah utama dalam membangun tanggung jawab dan kejujuran dalam ringkasan Fiskal Pemerintah Daerah adalah dengan memperkenalkan laporan anggaran yang telah ditinjau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit BPK dirancang untuk mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan dan menyoroti temuan-temuan yang signifikan serta memberikan opini atas laporan keuangan.

Bagian ini memperlihatkan kerugian negara/daerah selama periode 2005 hingga 30 Juni 2021 yang telah ditetapkan oleh pengelola anggaran.



Sumber :IHPS BPK Semester I Tahun 2021

Berdasarkan grafik data tersebut, pemerintah daerah mengalami kerugian negara sebesar Rp3,15 triliun (76%), merupakan puncak tertinggi dari total kerugian negara/daerah yang tercatat sejak tahun 2005 sampai dengan 30 Juni 2021, yaitu sebesar Rp4,16 triliun. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan krusial untuk perbaikan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah, dengan menekankan pentingnya peningkatan efisiensi Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengawas internal pemerintah juga diharapkan dapat melaksanakan fungsi audit dengan cermat untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang guna mencegah kerugian negara yang berasal dari pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan BPK berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari tiga hal pokok, yaitu penilaian atas Ikhtisar Realisasi Anggaran (Buku I), temuan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) (Buku II), dan temuan atas Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-

undangan (Buku III). Pemahaman yang memadai atas SPI serta peraturan dan pedoman merupakan hal yang mendasar untuk mendapatkan hasil rewiu yang dapat diandalkan.

SPI adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan pencapaian tujuan dengan memadai (Arens & Alvin, 2015). Kemudian, konsistensi terhadap peraturan dan pedoman mencakup kepatuhan terhadap sistem, metode, dan aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang (Arens dan Alvin, 2015). Selanjutnya, baik SPI maupun konsistensi memegang peranan penting dalam menjaga tanggung jawab.

Kelemahan dalam SPI dan kepatuhan dapat mengakibatkan kerugian bagi negara. Sampai saat ini, masih banyak permasalahan data yang tidak sesuai dalam laporan keuangan, seperti angka-angka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pemeriksaan BPK terhadap 541 LKPD tahun 2020 menunjukkan adanya 6.809 temuan, masalah-masalah SPI dan pelanggaran hukum dan peraturan mencakup kekurangan dalam pembukuan dan perincian kerangka kerja kontrol, kontrol moneter pendapatan dan konsumsi, dan struktur kontrol internal. Selain itu, masalah-masalah resistensi yang berbeda dapat menyebabkan kemalangan atau defisit pendapatan.

Pada tahun 2017 dan 2019, seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, pada tahun 2021, satu pemerintah daerah tidak memperoleh WTP karena ketidakpatuhan dan kelemahan pengendalian internal, yang mengindikasikan adanya masalah berulang dalam pemeriksaan BPK.

Opini WTP dari BPK merupakan pencapaian yang signifikan, meskipun masih ada temuan yang perlu mendapat perhatian, terutama di Kota Bukittinggi, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kabupaten Pasaman Barat. Terlepas dari masalah-masalah tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan saran. Penilaian review BPK tergantung pada empat ukuran utama, khususnya kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Pembukuan Pemerintah, kecukupan pengungkapan, konsistensi dengan peraturan dan pedoman, dan kelayakan kerangka kerja pengendalian intern.

Meskipun demikian, mayoritas pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat masih memiliki tingkat tindak lanjut yang rendah terhadap rekomendasi BPK. Hanya beberapa daerah seperti Kota Solok dan Kota Payakumbuh yang berhasil menyelesaikan tindak lanjut dengan tingkat yang memadai. Sebagian besar daerah lainnya masih perlu meningkatkan upaya mereka untuk memperbaiki sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan menjelaskan fenomena, peristiwa, dan kejadian saat ini. Menggunakan pendekatan analisis data sekunder (ADS), penelitian ini memanfaatkan temuan dari penelitian sebelumnya. Fokusnya adalah analisis terhadap temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Hal ini bertujuan untuk memahami pola temuan dan kecenderungan terjadinya temuan berulang dalam setiap periode analisis di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berupa uraian atau kalimat mengenai masalah yang ada. Data-data yang dianalisis berasal dari LHP BPK terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan literatur, mengakses temuan dari kabupaten/kota di Sumatera Barat melalui situs e-ppid BPK. Analisis isi, yang disajikan secara deskriptif melalui tabulasi, digunakan untuk analisis, termasuk menentukan unit umum temuan, pengkodean berdasarkan jenis temuan SPI dan kepatuhan, serta analisis terhadap temuan yang berulang dalam periode penelitian. Dalam pengkodean temuan, diterapkan empat konsep, termasuk jenis laporan keuangan, permasalahan akun temuan atas

SPI, permasalahan akun temuan atas kepatuhan, dan kriteria pengendalian internal berdasarkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Setiap temuan diberikan kode angka 1 jika ditemukan, dan 0 jika tidak ditemukan. Tujuan analisis adalah untuk memahami pola temuan berulang dan non-berulang serta mengelompokkan temuan berdasarkan kriteria tertentu seperti jenis laporan keuangan, jenis permasalahan SPI, dan kriteria SPIP. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara jenis temuan dan memahami karakteristiknya dalam setiap periode penelitian. Hasil dan Pembahasan

3. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini berkonsentrasi pada analisis temuan terkait sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di empat kabupaten/kota di Sumatera Barat, yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kabupaten Pasaman Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya jumlah temuan dengan opini WTP selama periode 2017-2021 dari total 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah temuan SPI dan kepatuhan masih mengalami fluktuasi. Kota Bukittinggi memiliki total 73 temuan selama lima periode dengan opini WTP, Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan dari opini WTP ke WDP dengan total 94 temuan, Kota Padang memiliki 104 temuan dengan opini WTP, dan Kabupaten Pasaman Barat mempertahankan opini WTP dengan total 71 temuan. Secara keseluruhan, terdapat 178 temuan SPI dan 164 temuan kepatuhan selama lima periode. Temuan-temuan ini akan diklasifikasikan dan dianalisis sesuai dengan rumusan analisis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Analisis Akun-Akun Berdasarkan Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Tahap awal dari penelitian ini meliputi analisis atas keseluruhan akun pada setiap periode penelitian di Kota Bukittinggi, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kabupaten Pasaman Barat. Temuan-temuan terkait SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan akan disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, temuan-temuan yang telah ditabulasikan akan dibedah untuk melihat pola-pola yang muncul dari temuan tersebut. Terakhir, temuan-temuan yang spesifik untuk empat kabupaten/kota akan disajikan:

1. Kota Bukittinggi

Langkah awal penelitian ini adalah menganalisis akun-akun dalam setiap periode di Kota Bukittinggi, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kabupaten Pasaman Barat. Temuan disusun dalam tabulasi untuk SPI dan kepatuhan peraturan perundang-undangan. Setelah itu, dilakukan analisis pola temuan. Berikut ringkasan temuan di empat kabupaten/kota tersebut.

2. Kabupaten Kepulauan Mentawai

Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, temuan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan selama 2017-2021 melibatkan akun kas daerah, piutang pajak, persediaan, investasi, piutang lainnya, aset tetap, retribusi daerah, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan belanja modal. Masalah juga terdapat pada laporan Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

3. Kota Padang

Di Kota Padang, dilakukan analisis terhadap akun-akun temuan berdasarkan sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan selama periode 2017 hingga 2021. Ditemukan berbagai kendala dalam SPI, termasuk akun kas daerah, piutang pajak, persediaan, aset tetap, penerimaan pajak, investasi permanen, dan lain-lain.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga menghadapi masalah pada akun kas daerah, investasi permanen, aset tetap, pendapatan pajak, retribusi, dan belanja.

4. Kabupaten Pasaman Barat

Di Kabupaten Pasaman Barat, analisis temuan SPI dan kepatuhan peraturan perundang-undangan periode 2017-2021 mengungkapkan permasalahan pada akun piutang pajak, persediaan, aset tetap, investasi permanen, retribusi daerah, pendapatan daerah, kas daerah, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja pegawai. Kepatuhan terhadap peraturan juga menghadapi kendala pada akun kas daerah, investasi permanen, retribusi, aset tetap, pendapatan pajak daerah, aset lain-lain, dan belanja.

Dari analisis atas akun-akun temuan SPI dan kepatuhan, teridentifikasi pola temuan yang berjenjang, dimulai dari pejabat eselon terendah hingga eselon tertinggi dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab di setiap tingkatan. Sementara itu, pola yang muncul dari temuan kepatuhan menunjukkan masih banyak pihak yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berpotensi menyebabkan pemborosan keuangan daerah akibat kelebihan pembayaran, karena kurangnya pemahaman pihak yang bertanggung jawab.

Analisis Frekuensi Temuan berdasarkan Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Setelah mengevaluasi hasil pemeriksaan BPK, didapati bahwa temuan, baik dari SPI maupun kepatuhan, terfokus pada komponen dalam laporan keuangan Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Penjabaran analisis untuk masing-masing temuan pada Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) akan disampaikan dengan lebih detail.

1. Neraca

Dari tabulasi frekuensi kemunculan komponen neraca terkait temuan SPI dan Kepatuhan, terungkap bahwa aset menjadi komponen neraca yang paling sering menghadapi masalah, diikuti oleh kewajiban. Sementara itu, tidak pernah ditemukan temuan pada ekuitas, baik dari SPI maupun kepatuhan..

- Aset: Temuan SPI terutama berkaitan dengan aset lancar di empat Kabupaten/Kota, sementara temuan kepatuhan mencakup aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Secara lebih rinci, temuan pada aset lancar terutama terkait dengan Kas di kas daerah, Persediaan, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lainnya. Investasi permanen merupakan temuan yang sering muncul pada SPI, sementara pada kepatuhan terdapat temuan pada investasi permanen. Aset tetap yang sering menjadi temuan pada SPI adalah peralatan dan mesin, sedangkan pada kepatuhan adalah tanah dan aset tetap lainnya.
- Kewajiban: Hanya pada Kota Padang di tahun 2021 ditemukan masalah terkait kewajiban jangka pendek, yaitu utang belanja.
- Ekuitas: Tidak ditemukan masalah terkait ekuitas pada empat Kabupaten/Kota yang dianalisis selama periode 2017-2021.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dalam LRA, analisis didasarkan pada tiga kelompok akun.

- Pendapatan: Temuan yang sering terjadi pada LRA terkait dengan Pendapatan Asli Daerah pada SPI dan kepatuhan. Komponen PAD yang sering memiliki masalah adalah pajak daerah pada SPI dan retribusi daerah pada kepatuhan.
- Belanja: Temuan SPI dan kepatuhan sering terjadi pada Belanja Operasi, dengan temuan terbanyak adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang&Jasa, dan Belanja Hibah.

- Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa temuan yang sering muncul pada komponen Neraca terkait SPI adalah aset lancar, investasi permanen, dan aset tetap seperti peralatan dan mesin. Sementara pada kepatuhan, temuan terkait dengan aset lancar, investasi permanen, tanah, dan aset tetap lainnya. Pada LRA, temuan terbanyak terjadi pada Pendapatan Asli Daerah, terutama terkait pajak daerah pada SPI dan retribusi daerah pada kepatuhan. Sedangkan pada Belanja, temuan terbanyak adalah pada Belanja Operasi, terutama Belanja Pegawai dan Belanja Barang&Jasa baik pada SPI maupun kepatuhan.

Analisis Permasalahan Atas Akun-Akun Temuan

1. Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPI) menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK

Kelemahan dalam SPI terbagi menjadi tiga kelompok: pengendalian internal akuntansi dan pelaporan, pengendalian anggaran belanja, dan pendapatan, serta pengendalian internal secara umum. Analisis menunjukkan temuan terutama terkait kelemahan dalam pengendalian anggaran belanja dan pendapatan. Misalnya, terdapat kesalahan dalam penganggaran belanja pegawai dan belanja modal, ketidaksesuaian antara kas yang disetor dengan laporan keuangan, pelaksanaan kegiatan yang kurang memadai, dan kesalahan dalam pendapatan pajak daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Komponen pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

SPIP memiliki lima komponen, dan masalah umum yang sering dijumpai berkaitan dengan pengendalian kegiatan. Masalah tersebut mencakup pencatatan dan pelaporan yang tidak akurat, perbedaan antara catatan dan keadaan sebenarnya, kelebihan pembayaran, dan perhitungan yang tidak valid. Temuan-temuan ini merupakan masalah umum yang sering muncul di setiap daerah yang diteliti.

3. Komponen Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan tabulasi temuan dari komponen ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat enam komponen yang dianalisis. Temuan tersebut umumnya terjadi di setiap Kabupaten/Kota, yang menunjukkan masih banyaknya OPD yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini berdampak pada kerugian keuangan daerah, sesuai dengan hasil audit terhadap LKPD.

Analisis Temuan Berulang

Setelah dilakukan analisis, teridentifikasi kecenderungan temuan yang berulang pada beberapa akun di Kota Bukittinggi. Temuan tersebut meliputi total 34 temuan pada SPI yang tersebar dalam 13 akun. Ditemukan bahwa akun-akun tersebut memiliki kecenderungan berulang, termasuk kas, piutang pajak, belanja barang dan jasa, tanah, dan investasi permanen. Di sisi lain, pada temuan kepatuhan, terdapat 17 temuan yang tersebar dalam 7 akun, dimana akun-akun tersebut juga menunjukkan kecenderungan temuan berulang, seperti kas, belanja barang dan jasa, retribusi daerah, dan belanja modal.

Analisis Penyebab Temuan Berulang

Dari temuan-temuan berulang yang terjadi selama beberapa periode, dapat disimpulkan bahwa tidak dilaksanakannya tindak lanjut dari rekomendasi BPK menjadi salah satu penyebabnya. Hal ini menyebabkan banyaknya temuan berulang pada akun dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut mencakup kelemahan dalam sistem

pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peran yang belum optimal dari pihak lain, dan kurangnya pelaksanaan tindak lanjut yang belum selesai.

4. Penutup

Kesimpulan

Analisis LHP BPK empat kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan akun paling sering bermasalah pada Laporan Neraca, seperti Kas Daerah, Piutang Pajak, dan Investasi Permanen. Sedangkan di Laporan Realisasi Anggaran, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Hibah, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai sering menjadi sorotan. Pola ini mencerminkan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, berdampak pada kerugian keuangan pemerintah daerah.

Permasalahan dalam akun-akun sebagai temuan SPI dapat dikategorikan berdasarkan tiga konsep. Pertama, terdapat tiga kelemahan SPIP berdasarkan LHP, dengan temuan terbanyak pada sistem pengendalian dan pelaksanaan anggaran pendapatan/belanja. Kedua, dalam lima komponen sistem pengendalian internal, temuan terbanyak terjadi pada komponen lingkungan pengendalian internal dan kegiatan pengendalian. Ketiga, berdasarkan enam komponen ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah dan potensi kerugian.

Meskipun terdapat kecenderungan temuan berulang pada beberapa akun, hal ini tidak selalu menandakan bahwa temuan tersebut sama. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih rinci untuk memahami permasalahan temuan dan keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kecenderungan temuan berulang disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya optimalisasi peran pihak lain, dan belum tuntasnya pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari BPK. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya penyelesaian tindak lanjut jangka panjang agar tidak terjadi permasalahan yang sama secara berulang.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menganalisis semua akun temuan dari LHP untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, termasuk yang mendapatkan opini WTP maupun tidak. Penelitian ini juga disarankan untuk diperkuat dengan data wawancara kepada pemerintah/kota yang menjadi objek, sehingga dapat memahami secara lebih rinci pola temuan, permasalahan terkait SPI dan Kepatuhan, temuan berulang, serta penyebab dan upaya untuk mengurangi temuan berulang..

Daftar Pustaka

- Alkam, R., & Bastian, I. (2017). *Analisis Temuan Berulang Pada Pemeriksaan Bantuan Keuangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Amyulianthy, R., Khair, J., & Lysandra, S. (2016). Characteristics and Political Connection To Local Government Performance. *Characteristics and Political Connection To Local Government Performance*, 8(2), 1–14.
- Arens, & Alvin. (2015). Auditing & Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi. In *Erlangga* (15 Jilid I). Erlangga.
- Bastian, Indra. (2014). *Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggung jawaban Pemerintah*. Salemba Empat.
- Boynton, W. C. J., & Kell. (2014). *Modern Auditing* (Eighth). John Wiley And Sons, Inc.
- Butt & Lindsey. (2018). Indonesian Law Oxford University Press. In *Indonesian Law*.
- Chandler, C. R., Plano, & C. J. (1982). *Public Administration Dictionary* (John Wiley).

- Evans, J., Patton, J. (1987). Signaling and monitoring in public sector accounting. *Journal OfAccounting Research*, 25, 130–158.
- Fadzil, Faudziah Hanim Nyoto, H. (2011). Fiscal Decentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia. *World Review of Business Research*, 1(2), 51–70.
- Hawari, K., & Sari, V. F. (2023). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(3), 1290–1305.
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan* (Adipramono (ed.)). PT Grasindo
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1–26.
- IHPS I Tahun 2021. (2021). *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia IHPS I Tahun 2021*. <http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/3583>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 77–132. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>
- Kundarah, A. S. (2022). *Analisis Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantaeng= Analysis of Capital Expenditure and Economic Growth of* <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12976/>
- Lativa, Y. (2016). *ANALISIS TEMUAN AUDIT BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (STUDI KASUS TERHADAP LHP BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013 DAN 2014*.
- Lestari, S. T., & Hutagaol, H. D. (2023). Analisis Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Al Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 755–772. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2699>
- Meiliza, R. (2015). Studi Eksploratif terhadap LHP BPK Atas LKPD Tingkat Provinsi yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian. In *Tesis*.
- Moe, T. M. (1984). The New Economics of Organization. *American Journal of Political Science*, 28(4), 739. <https://doi.org/10.2307/2110997>
- Monteiro, J. M. (2019). *Polemik Peraturan Presiden dalam*.
- Mulyadi. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 1(4), 202–212. <https://doi.org/2303-1174>
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.
- Nurmiati. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 13(2), 1–17. <http://journal.feb.unmul.ac.id>
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik* (p. 7). Alfabeta.
- PP Nomor 71 Tahun 2010. (n.d.). *PP Nomor 71 Tahun 2010*.
- Putra, S. S., & Sentosa, M. F. (2021). Analisis Tindak lanjut Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 1(1), 120–128.
- Rahmayani, M. W. (2023). *Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan*. 6(2), 293–300.
- Rina, A. A. A. (2017). *Analisa Temuan Aset Tetap Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga*.
- Salah, I., & Rahadian, Y. (2023). Akar Permasalahan Tidak Tercapainya Opini WTP :Studi Kasus di Pemerintah Daerah XX. *INDONESIAN TREASURY REVIEW JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 8(2), 109–124.

- Sekaran,Uma. (2015). *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis* (R. Widyaningrum (ed.); 4th ed.). Salemba Empat.
- Silalahi, U. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama.
- Simanjuntak, H. Y., Agustiawan, & Putri, A. M. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Ketidak Patuhan Pada Peraturan Perundang- Undangan (Studi Pada BPK Perwakilan Provinsi Riau). *Accounting and Management Journal*, 7(1), 95–107.
- Siregar, M. I., & Rudiansyah, J. (2019). Pengaruh Jumlah Temuan Audit Terhadap Opini Audit Kabupaten/Kota Se-Sumatera. *Jurnal Ecoment Global*, 4(1), 101–124. <https://doi.org/10.35908/jeg.v4i1.576>
- Sujarweni, & Endrayanto. (2012). *penegertian pengumpulan data*.
- Vandervelde, S. D., Tubbs, R. M., Schepanski, A., & Messier, Jr., W. F. (2009). Experimental Tests of a Descriptive Theory of Auditee Risk Assessment. *Auditing:A Journal of Practice&Theory*, 28(2), 145–169.
- Wardhani, R., Rossieta, H., Martani, & Djamaluddin, S. (2017). *The Role of Good Governance in Public Sector in Increasing the Government Expenditure Efficiency and Performance of Local Government: The Case of Indonesia The Role of Good Governance in Public Sector in Increasing the Government Expenditure Efficiency an. 2*.
- Zimmerman, J. L. 1977. (1977). The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research*, 15, 107–144.